

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Objek analisis dalam kajian ini ialah Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021 hingga 2024. Sementara itu, jenis data yang dipergunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. Data tersebut kemudian diolah untuk memberi gambaran mengenai karakteristik perusahaan sekaligus menganalisis keterkaitan antarvariabel penelitian.

Kajian ini menggunakan metode sampel jenuh, di mana seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2021–2024 dijadikan unit analisis. Dari 14 BUS yang terdaftar, dua bank dikecualikan karena baru memperoleh izin operasional penuh selama periode pengamatan sehingga data laporan tahunan tidak tersedia secara lengkap.

4.2 Statistika Deskriptif

Sebagai tahap awal analisis data, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Menurut Ghozali (2021), metode ini digunakan untuk merangkum data agar memberi gambaran umum mengenai kondisi variabel yang diteliti. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Fraud</i>	48	,0	28,0	3,938	5,6959
Komite Audit	48	3,0	10,0	4,188	1,4682
<i>Good Corporate Governance</i>	48	3,0	5,0	3,958	,4356
<i>Whistleblowing System</i>	48	,0	577,0	58,771	155,0982
<i>Valid N (listwise)</i>	48				

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Karakteristik data penelitian dapat dilihat melalui analisis statistik deskriptif yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi setiap variabel. Berdasarkan Tabel 4.1, penelitian ini menggunakan 48 observasi yang berasal dari 12 perusahaan selama periode empat tahun. Analisis ini memberi gambaran umum serta pola sebaran data dari masing-masing variabel penelitian.

Tingkat *fraud* pada perusahaan sampel memperlihatkan variasi selama periode penelitian. Hasil statistik deskriptif mencatat jumlah kasus berkisar antara 0 hingga 28 dengan rata-rata sebesar 3,938. Temuan ini mengindikasikan jika terdapat perusahaan yang sama sekali tidak mengalami *fraud*, sementara perusahaan lainnya menghadapi jumlah kasus yang relatif tinggi dalam satu tahun pengamatan. Secara umum, rata-rata kejadian *fraud* pada perusahaan sampel berada pada kisaran tiga sampai empat kasus per tahun. Selain itu, standar deviasi sebesar 5,6959 yang melebihi nilai rata-ratanya memperlihatkan jika penyebaran data *fraud* cukup luas.

Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan yang jelas antara perusahaan dengan tingkat *fraud* rendah dan perusahaan dengan tingkat *fraud* yang lebih tinggi.

Pada variabel Komite Audit, jumlah anggota independen dalam perusahaan berada pada kisaran 3 hingga 10 orang. Nilai rata-rata sebesar 4,188 memperlihatkan jika sebagian besar perusahaan mempunyai sekitar empat anggota Komite Audit independen. Kondisi tersebut mencerminkan jika perusahaan sampel secara umum telah memenuhi ketentuan regulator mengenai pembentukan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/201 yang menetapkan jumlah minimal tiga anggota. Sementara itu, standar deviasi sebesar 1,4682 memperlihatkan jika variasi jumlah anggota Komite Audit antarperusahaan relatif rendah. Hal ini mengindikasikan jika karakteristik data pada variabel tersebut cenderung seragam selama periode penelitian.

Dilihat dari hasil statistik deskriptif, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai rentang nilai antara 3,0 hingga 5,0 dengan rata-rata sebesar 3,958. Rata-rata tersebut menggambarkan jika kualitas penerapan tata kelola perusahaan pada Bank Umum Syariah sampel umumnya berada pada tingkat yang baik. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan memperoleh hasil penilaian yang memperlihatkan implementasi prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai selama periode penelitian. Selain itu, standar deviasi sebesar 0,4356 mengindikasikan jika perbedaan tingkat penerapan GCG antarperusahaan relatif kecil, sehingga data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya.

Pada variabel *Whistleblowing System* (WBS), nilai terendah yang diperoleh ialah 0,0 sedangkan nilai tertinggi mencapai 577,0, dengan rata-rata sebesar 58,771. Rentang nilai yang cukup lebar tersebut memperlihatkan adanya variasi yang besar dalam jumlah laporan maupun pengaduan yang diterima perusahaan. Selama periode pengamatan, terdapat perusahaan yang tidak menerima laporan sama sekali, sementara perusahaan lainnya mencatat jumlah pengaduan yang sangat tinggi dalam satu tahun. Kondisi ini memperlihatkan jika intensitas penggunaan mekanisme *whistleblowing* berbeda-beda di antara perusahaan sampel. Secara rata-rata, perusahaan menerima sekitar 59 pengaduan setiap tahunnya. Aktivitas pelaporan yang tinggi memperlihatkan jika saluran *whistleblowing system* dimanfaatkan secara aktif sebagai sarana penyampaian dugaan pelanggaran, baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Di sisi lain, besarnya nilai standar deviasi yang mencapai 155,0982 dan melebihi nilai rata-ratanya mengindikasikan adanya perbedaan jumlah pengaduan yang cukup besar antarperusahaan selama periode pengamatan. Kondisi tersebut memperlihatkan jika distribusi data pada variabel *Whistleblowing System* cenderung tidak merata.

Hasil analisis statistik deskriptif juga memperlihatkan jika setiap variabel penelitian mempunyai karakteristik data yang berbeda. Komite Audit dan *Good Corporate Governance* memperlihatkan tingkat variasi yang relatif rendah sehingga data lebih seragam antarperusahaan. Sebaliknya, *Fraud* dan *Whistleblowing System* mempunyai tingkat keragaman yang lebih tinggi, yang tercermin dari penyebaran data yang lebih luas. Perbedaan karakteristik tersebut

memperlihatkan jika masing-masing variabel memberi gambaran yang beragam dan tetap memenuhi kebutuhan untuk dilakukan analisis pada tahap selanjutnya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Uji Asumsi Klasik

Keakuratan hasil analisis regresi linear berganda sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi-asumsi klasik dalam model. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, model terlebih dahulu diuji untuk memastikan tidak terdapat masalah yang dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian. Adapun uji asumsi klasik yang diterapkan dalam kajian ini meliputi empat pengujian sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

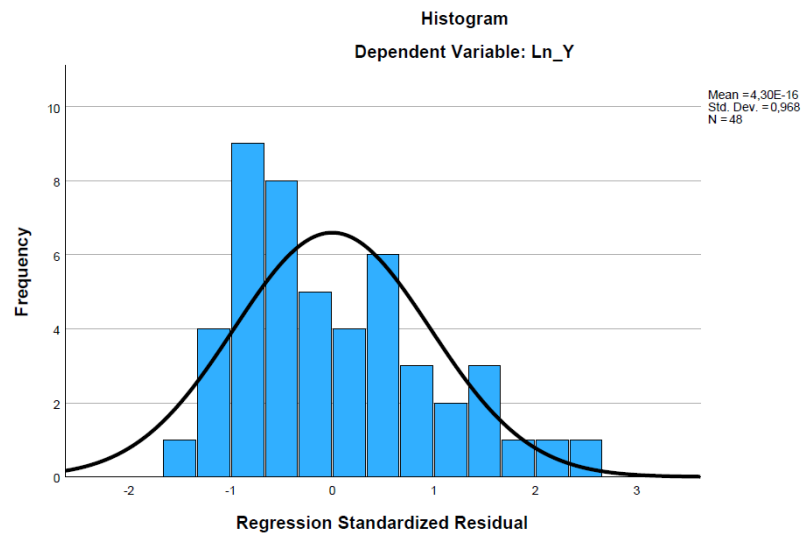
Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, perlu dipastikan jika residual pada model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pemenuhan asumsi ini penting karena distribusi residual yang normal akan mendukung keandalan hasil pengujian statistik yang dipergunakan dalam penelitian. Untuk menilai normalitas, kajian ini menggunakan pendekatan grafik dan statistik.

Menurut Santoso (2015), distribusi data dapat dikatakan normal apabila histogram memperlihatkan pola yang menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped*) dan tidak memperlihatkan kemencengan yang dominan ke salah satu sisi. Berdasarkan hasil pengujian awal,

histogram memang telah membentuk pola yang mendekati kurva lonceng, tetapi masih terlihat adanya kecenderungan kemencengan ke arah kiri. Kondisi tersebut mengindikasikan jika distribusi residual belum sepenuhnya normal, sehingga data belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian parametrik pada tahap berikutnya.

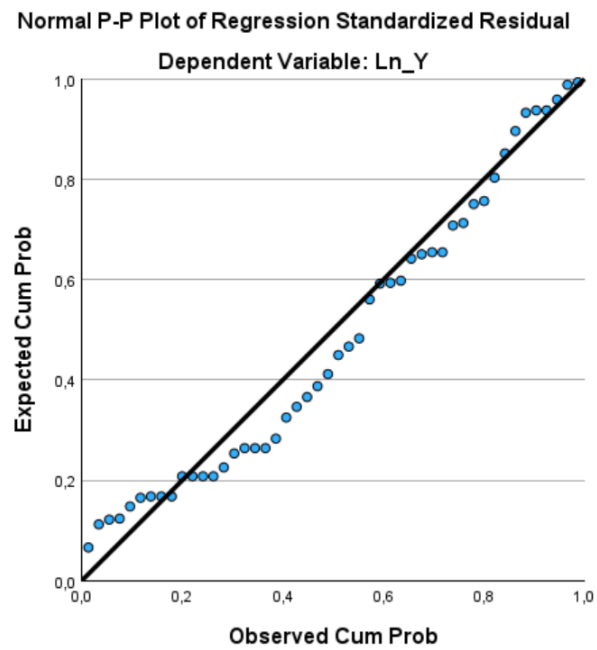
Karena pola distribusi data pada histogram memperlihatkan kecenderungan *positive skewness* maupun kemencengan ke sisi kanan, maka dilakukan proses transformasi data sebelum analisis lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki distribusi data agar lebih mendekati normal, mengingat menurut Ghozali (2021) data yang tidak berdistribusi normal dapat memengaruhi validitas hasil pengujian statistik. Untuk tujuan tersebut, kajian ini menggunakan transformasi logaritma natural (Ln). Karena terdapat nilai 0 pada data penelitian, transformasi dilakukan menggunakan metode $Ln(X+1)$ agar seluruh data tetap dapat ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (Osborne, 2002). Selanjutnya, setelah transformasi dilakukan, data diuji kembali untuk mengetahui apakah distribusi data telah mendekati normal.

Gambar 4. 1
Grafik Histogram Uji Normalitas setelah Tranformasi



Sumber: Output IBM SPSS 26

Gambar 4. 2 Grafik Normal P-P Plot setelah Transformasi



Sumber: Output IBM SPSS 26

Indikasi distribusi normal dapat dilihat dari dua hasil pengujian grafis. Pertama, histogram pada Gambar 4.1 memperlihatkan pola distribusi yang relatif seimbang tanpa dominasi kemencengan ke kiri maupun ke kanan. Kedua, titik-titik pada grafik *Normal P-P Plot* (Gambar 4.2) tersebar mengikuti garis diagonal yang menjadi acuan normalitas. Berdasarkan kedua indikator tersebut, residual dalam model regresi dinilai telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>						
	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			<i>Saphiro-Wilk</i>		
	<i>Statictic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Statictic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	,119	48	,084	,940	48	,017
<i>a. Liliefors Significance Correction</i>						

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Selain itu, dilakukan analisis statistik menggunakan *Saphiro-Wilk* dan *Kolmogorov-Smirnov* untuk mendapatkan angka signifikansi. Berdasarkan Tabel 4.2, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* memperlihatkan nilai signifikansi sebesar $0,084 > 0,05$, sedangkan uji *Shapiro-Wilk* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$. Namun, karena jumlah sampel penelitian mendekati 50 data dan didukung oleh grafik histogram serta *Normal P-P Plot* yang memperlihatkan pola distribusi normal, maka residual penelitian dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak dilanjutkan ke pengujian parametrik.

2. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi ialah tidak adanya hubungan linear yang kuat antarvariabel independen. Untuk mengevaluasi hal tersebut, dipergunakan uji multikolinieritas yang didasarkan pada nilai *tolerance* dan VIF. Nilai *tolerance* yang rendah ($\leq 0,10$) dan VIF yang tinggi (≥ 10) memperlihatkan adanya indikasi multikolinieritas. Hasil pemeriksaan pada asumsi tersebut dalam kajian ini ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Komite Audit	,923	1,083
	GCG	,938	1,066
	WBS	,973	1,028
a. <i>Dependent Variable: Fraud</i>			

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Tidak ditemukannya gejala multikolinieritas dalam model regresi ditunjukkan oleh terpenuhinya dua kriteria pengujian, yakni nilai *tolerance* dan VIF. Berdasarkan Tabel 4.3, seluruh variabel independen mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10, yakni Komite Audit sebesar 0,923, GCG sebesar 0,938, dan WBS sebesar 0,973. Sementara itu, nilai VIF masing-masing variabel berada jauh di bawah angka 10, yakni

1,083, 1,066, dan 1,028. Oleh karena itu, hubungan antarvariabel independen tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Keberadaan heteroskedastisitas pada model regresi dievaluasi melalui uji Glejser. Hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.4 memperlihatkan jika seluruh variabel independen mempunyai tingkat signifikansi melebihi 0,05. Kondisi ini mengindikasikan jika variabel-variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai *Absolut Residual* (ABRESID). Dengan demikian, model regresi tidak memperlihatkan indikasi heteroskedastisitas dan memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam analisis lanjutan.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

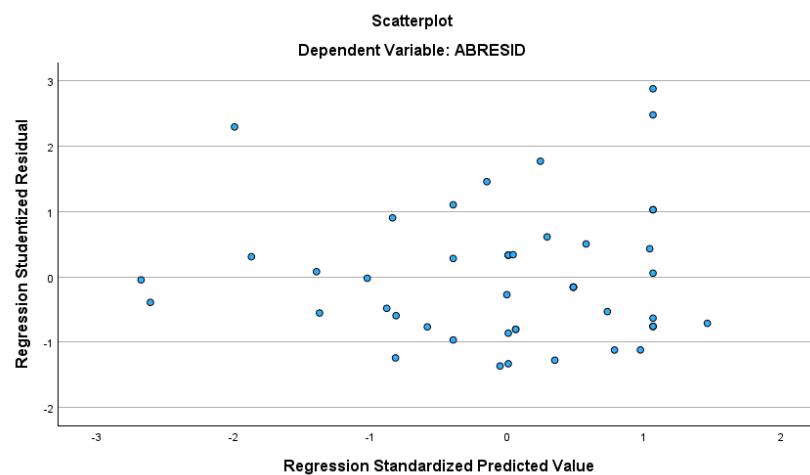
<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(<i>Constant</i>)	,659	,513
	Komite Audit	-1,711	,094
	GCG	,519	,607
	WBS	-1,657	,105
a. <i>Dependent Variable: ABRESID</i>			

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Penyebaran residual yang tidak memperlihatkan pola tertentu mengindikasikan jika varians *error* pada model regresi cenderung

stabil. Berdasarkan Gambar 4.3, titik-titik *scatterplot* tersebar secara acak di sekitar angka nol pada sumbu Y, baik pada bagian atas maupun bawah. Temuan tersebut menjadi dasar jika model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga hasil analisis selanjutnya dapat dilakukan menggunakan model tersebut.

Gambar 4.3 Grafik *Scatterplot*



Sumber: Output IBM SPSS 26

4. Uji Autokorelasi

Keberadaan autokorelasi dalam model regresi diuji melalui pendekatan *Durbin-Watson* (DW), yang bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan antar residual. Hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.5 memperlihatkan nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 2,201. Dengan jumlah observasi sebanyak 48 dan tiga variabel independen pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,4064 serta batas atas (dU) sebesar 1,6708. Berdasarkan nilai tersebut,

diperoleh pula nilai $4 - dU$ sebesar 2,3292 yang dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengujian autokorelasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^a</i>	
<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	2,201
a. <i>Dependent Variable: Fraud</i>	

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi ditunjukkan oleh posisi nilai Durbin-Watson yang berada pada daerah bebas autokorelasi, yakni sebesar 2,201. Karena nilai tersebut terletak di antara batas dU (1,6708) dan $4 - dU$ (2,3292), model regresi dapat dianggap telah memenuhi asumsi autokorelasi sehingga hasil analisis selanjutnya dapat diinterpretasikan dengan baik.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah model penelitian dinyatakan memenuhi seluruh asumsi klasik, yakni normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, analisis regresi linear berganda dapat dilakukan. Pemenuhan asumsi tersebut memperlihatkan jika model yang dipergunakan telah memenuhi persyaratan statistik untuk menghasilkan estimasi yang dapat diinterpretasikan. Melalui tabel *coefficients*, analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen, yakni Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*, pada *fraud* secara

parsial. Adapun hasil pengujian regresi linear berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>		<i>Unstandarized B</i>
1	<i>(Constant)</i>	-1,316
	Komite Audit	,679
	GCG	,557
	WBS	,276
a. <i>Dependent Variable: Fraud</i>		

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Hasil pengolahan data sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6 menghasilkan suatu persamaan regresi linear berganda. Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -1,316 + 0,679X_1 + 0,557X_2 + 0,276X_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai Konstanta dalam model regresi bernilai -1,316. Angka ini mengindikasikan jika apabila seluruh variabel bebas, yakni Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*,

berada pada kondisi nol, maka nilai *fraud* yang diprediksi oleh model ialah sebesar -1,316.

2. Komite Audit (X1) terhadap Beta (Y)

Pola hubungan yang terbentuk antara Komite Audit dan *fraud* memperlihatkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari koefisien regresi sebesar 0,679, yang mengindikasikan jika setiap kenaikan satu unit pada Komite Audit akan diikuti oleh peningkatan *fraud* sebesar 0,679 unit, dengan syarat variabel independen lainnya tetap. Dengan demikian, perubahan pada kedua variabel cenderung bergerak dalam arah yang sama.

3. *Good Corporate Governance* (X2) terhadap Beta (Y)

Besaran koefisien regresi *Good Corporate Governance* yang mencapai 0,557 memperlihatkan adanya pengaruh positif terhadap *fraud*. Dengan kondisi variabel bebas lainnya tetap, kenaikan satu satuan pada GCG akan diikuti oleh peningkatan *fraud* sebesar 0,557 satuan. Oleh karena itu, hubungan antara *Good Corporate Governance* dan *fraud* bersifat searah.

4. *Whistleblowing System* (X3) terhadap Beta (Y)

Besarnya koefisien regresi sebesar 0,276 mengindikasikan jika *Whistleblowing System* mempunyai hubungan positif dengan *fraud*. Dengan asumsi variabel independen lain berada pada kondisi tetap,

setiap kenaikan satu unit pada *Whistleblowing System* diperkirakan akan meningkatkan nilai *fraud* sebesar 0,276 unit. Oleh karena itu, kedua variabel memperlihatkan pola hubungan yang bergerak searah.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sebagian variasi pada variabel *fraud* dapat dijelaskan oleh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* yang dipergunakan dalam model penelitian. Hal ini terlihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,322 maupun 32,2% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7. Sementara itu, sebesar 67,8% variasi *fraud* dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>			
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	,605 ^a	,366	,322
a. <i>Predictors: (Constant), WBS, GCG, Komite Audit</i> b. <i>Dependet Variable: Fraud</i>			

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Akurasi pengukuran koefisien determinasi dalam kajian ini mengacu pada nilai *Adjusted R Square*, mengingat indikator tersebut telah mempertimbangkan jumlah variabel bebas yang dianalisis. Dengan demikian, interpretasi terhadap kemampuan model menjadi lebih reliabel.

2. Uji Statistik F (ANOVA)

Signifikansi hasil uji F (ANOVA) yang lebih kecil dari 0,05 memperlihatkan jika model regresi yang dipergunakan mempunyai pengaruh yang bermakna secara statistik. Dengan nilai F sebesar 8,451 dan tingkat signifikansi $< 0,001$, dapat disimpulkan jika Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara kolektif memengaruhi *fraud*.

Tabel 4.8 Hasil Uji F (ANOVA)

ANOVA ^a			
<i>Model</i>		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	8,451	<,001 ^b
	Residual		
	Total		
a. <i>Dependent Variable: Fraud</i>			
b. <i>Predictors: (Constant), WBS, GCG, Komite Audit</i>			

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Kelayakan model regresi dalam kajian ini dapat dibuktikan melalui hasil uji F yang signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan jika

variabel-variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel *fraud*. Dengan adanya hasil yang signifikan tersebut, analisis selanjutnya dapat dilanjutkan melalui uji t untuk mengidentifikasi variabel independen yang memberi pengaruh secara individual terhadap *fraud*.

Hasil Uji F tersebut sekaligus menjadi dasar penerimaan hipotesis keempat (H4). Berdasarkan nilai F sebesar 8,451 dengan signifikansi < 0,001, dapat disimpulkan bahwa Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2021–2024. Dengan demikian, H4 diterima.

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dianalisis menggunakan uji t. Adapun hasil analisis yang diperoleh ialah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

<i>Coefficients^a</i>				
<i>Model</i>		<i>Unstandarized B</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	-1,316	-,521	,605
	Komite Audit	,679	1,351	,184
	GCG	,557	,403	,689
	WBS	,276	4,568	<,001

a. <i>Dependent Variable: Fraud</i>

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2026)

Uraian mengenai masing-masing variabel berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima karena Komite Audit tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,184 yang lebih besar dari 0,05, meskipun koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,679.
2. Hipotesis kedua (H2) juga ditolak karena *Good Corporate Governance* tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Temuan tersebut didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,689 yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05, dengan koefisien regresi positif sebesar 0,557.
3. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, *Whistleblowing System* terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* sehingga H3 diterima. Hasil pengujian memperlihatkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien regresi positif sebesar 0,276. Temuan ini mengindikasikan jika semakin efektif penerapan sistem pelaporan pelanggaran, semakin besar pula

kemungkinan terungkapnya indikasi *fraud* dalam perusahaan. Oleh karena itu, *Whistleblowing System* berperan dalam memperkuat proses deteksi dini serta mendukung pengendalian *fraud* melalui mekanisme pelaporan yang efektif.

4.4 Interpretasi Hasil

4.4.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)

Upaya pencegahan *fraud* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan Komite Audit. Meskipun hubungan yang terbentuk memperlihatkan arah positif, hasil pengujian statistik memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,184 yang berada di atas batas 0,05. Kondisi tersebut mengindikasikan jika peran Komite Audit dalam perusahaan sampel belum mampu memberi kontribusi yang berarti terhadap peningkatan efektivitas pencegahan kecurangan.

Optimalnya pengawasan terhadap manajemen dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam menekan risiko terjadinya *fraud*. Dalam *Agency Theory*, fungsi tersebut dijalankan oleh Komite Audit sebagai pihak yang membantu menjembatani kepentingan prinsipal dan agen serta mengurangi dampak asimetri informasi. Melalui peran tersebut, Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat proses pengawasan dalam perusahaan. Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan jika keberadaan Komite Audit tidak selalu sejalan dengan

efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan jika pembentukan Komite Audit belum tentu diikuti oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang optimal. Pada beberapa perusahaan, keberadaan Komite Audit lebih diarahkan untuk memenuhi tuntutan regulasi dan aspek kepatuhan tata kelola, sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, keberhasilan fungsi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Komite Audit, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan peran yang dijalankannya.

Keberadaan anggota Komite Audit independen yang lebih banyak tidak serta-merta mencerminkan tingginya efektivitas pencegahan *fraud* dalam perusahaan. Temuan ini terlihat dari hasil penelitian yang memperlihatkan jika pengaruh Komite Audit terhadap pencegahan *fraud* belum tampak secara signifikan. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya variasi data pada variabel Komite Audit, karena seluruh perusahaan sampel telah menyesuaikan diri dengan ketentuan regulator terkait independensi Komite Audit. Akibatnya, perbedaan antarperusahaan menjadi kurang terlihat sehingga kontribusi variabel tersebut sulit dibedakan secara statistik. Dengan demikian, efektivitas pencegahan *fraud* lebih ditentukan oleh aspek substantif, seperti kualitas pengawasan, kompetensi anggota, pelaksanaan independensi yang sesungguhnya, serta kemampuan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) dan Sumanto & Zuhdi (2026), yang kemungkinan

disebabkan oleh perbedaan indikator pengukuran, karakteristik sampel, dan periode penelitian.

4.4.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)

Upaya pencegahan *fraud* pada perusahaan sampel dalam kajian ini tidak memperlihatkan adanya keterkaitan yang signifikan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Meskipun koefisien regresi memperlihatkan arah positif, hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,689 maupun lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan sampel belum mampu memberi kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan.

Pencegahan *fraud* pada perusahaan sampel dalam kajian ini tidak terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh *Good Corporate Governance* (GCG). Temuan tersebut mengindikasikan jika keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan belum tentu mampu meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap kecurangan. Salah satu penyebabnya ialah implementasi GCG yang masih berfokus pada pemenuhan persyaratan regulator dan aspek administratif, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik operasional sehari-hari. Selain itu, indikator GCG yang dipergunakan berupa nilai *self-assessment* dari masing-masing perusahaan berpotensi menimbulkan bias penilaian, sehingga belum tentu menggambarkan kondisi pengawasan dan pengendalian internal yang sesungguhnya.

Dalam kerangka *Agency Theory*, GCG dipandang sebagai instrumen yang dirancang untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul akibat ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tata kelola perusahaan diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan manajemen serta membatasi peluang terjadinya tindakan kecurangan. Namun, hasil kajian ini memperlihatkan jika fungsi tersebut belum berjalan secara optimal pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, sehingga pengaruh GCG terhadap pencegahan fraud belum terlihat secara signifikan

Perbedaan hasil kajian ini dengan beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan jika pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* masih belum konsisten. Maisaroh & Nurhidayati (2021) serta Azhari et al. (2022) menemukan jika *Good Corporate Governance* mampu memengaruhi upaya pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian Sugita & Khomisyah (2023) memperoleh hasil yang berbeda dan tidak signifikan. Variasi temuan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sampel, penggunaan indikator pengukuran, maupun periode penelitian yang dipergunakan. Oleh sebab itu, keberadaan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan tidak selalu menjamin meningkatnya efektivitas pencegahan *fraud* apabila penerapan prinsip-prinsip tata kelola belum dijalankan secara optimal dalam praktik perusahaan.

4.4.3 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Tingkat Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil penelitian, *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$) dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,276. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan *Whistleblowing System* yang tercermin dari semakin tingginya tingkat pelaporan pelanggaran, maka semakin tinggi pula jumlah kasus *fraud* yang terungkap dan tercatat oleh perusahaan..

Dalam perspektif *Agency Theory*, *Whistleblowing System* merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Keberadaan sistem pelaporan pelanggaran memungkinkan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang sebelumnya tidak diketahui oleh manajemen maupun pemilik perusahaan menjadi lebih mudah terungkap. Melalui mekanisme tersebut, peluang terdeteksinya tindakan kecurangan akan meningkat sehingga perusahaan dapat melakukan tindak lanjut dan pengendalian secara lebih cepat. Oleh karena itu, secara teoritis *Whistleblowing System* berperan dalam mendukung upaya pencegahan *fraud* melalui peningkatan efektivitas deteksi dini terhadap indikasi kecurangan.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan karena variabel *Whistleblowing System* dalam penelitian ini diproksikan melalui jumlah pelaporan pelanggaran yang disampaikan perusahaan, sedangkan variabel *fraud* diukur berdasarkan jumlah kasus *fraud* yang tercatat dalam satu periode. Penting untuk ditekankan bahwa

arah positif ini tidak berarti WBS menyebabkan *fraud* meningkat. Sebaliknya, temuan ini harus diinterpretasikan sebagai bukti bahwa mekanisme WBS yang aktif dan efektif menghasilkan lebih banyak pengungkapan kasus *fraud* yang merupakan tujuan utama sistem tersebut. Dalam perspektif *Agency Theory*, peningkatan pelaporan mencerminkan berkurangnya asimetri informasi antara prinsipal dan agen: semakin banyak informasi mengenai penyimpangan yang berhasil diungkap, semakin efektif sistem pengawasan perusahaan berjalan (Jensen & Meckling, 1976; Johannesen & Stolper, 2021). Oleh karena itu, hubungan positif antara WBS dan jumlah kasus *fraud* yang tercatat justru mengindikasikan keberhasilan mekanisme deteksi dini, bukan kegagalan pencegahan. Dengan demikian, peningkatan jumlah pelaporan melalui *Whistleblowing System* tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya tingkat kecurangan dalam perusahaan, melainkan menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan pengawasan berjalan lebih efektif dalam mendeteksi serta mengungkap indikasi kecurangan yang terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumanto & Zuhdi (2026) serta Sugita & Khomisyah (2023) yang menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki peran penting sebagai mekanisme deteksi dini dan pengendalian *fraud* dalam perusahaan. Semakin baik sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam mengidentifikasi serta menindaklanjuti indikasi kecurangan sebagai bagian dari upaya pencegahan *fraud*.

4.4.4 Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara Simultan terhadap Tingkat *Fraud*

Berdasarkan hasil Uji F (ANOVA) pada Tabel 4.8, diperoleh nilai F sebesar 8,451 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$, yang berada jauh di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa Komite Audit (X1), *Good Corporate Governance* (X2), dan *Whistleblowing System* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Fraud (Y) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2021-2024. Dengan demikian, H4 diterima.

Hasil ini memperlihatkan bahwa meskipun secara parsial Komite Audit dan *Good Corporate Governance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, ketiga variabel secara bersama-sama membentuk sistem pengawasan yang bermakna terhadap tingkat kecurangan yang terjadi di lingkungan Bank Umum Syariah. Kondisi tersebut konsisten dengan pandangan dalam *Agency Theory* bahwa pengendalian atas perilaku oportunistik agen tidak dapat hanya mengandalkan satu mekanisme tunggal, melainkan memerlukan kombinasi instrumen pengawasan yang saling melengkapi (Jensen & Meckling, 1976). Dengan kata lain, kelemahan satu mekanisme dapat dikompensasi oleh mekanisme lainnya dalam sistem pengawasan yang terintegrasi.

Dalam konfigurasi tersebut, Komite Audit berperan sebagai mekanisme pengawasan formal yang memantau kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. *Good Corporate Governance* menyediakan kerangka nilai dan prosedur yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Sementara itu,

Whistleblowing System berfungsi sebagai saluran deteksi dini yang memperluas jangkauan pemantauan prinsipal melampaui batas-batas hierarki formal. Interaksi ketiga mekanisme inilah yang secara bersama-sama menghasilkan tekanan pengawasan yang cukup kuat untuk berpengaruh terhadap tingkat *fraud*, meskipun secara individual dua di antaranya belum mencapai signifikansi statistik.

Temuan ini juga diperkuat oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,322, yang menunjukkan bahwa 32,2% variasi tingkat *fraud* pada perusahaan sampel dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh ketiga variabel independen tersebut. Meskipun sebesar 67,8% variasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, kontribusi ketiga variabel secara simultan tetap bermakna secara statistik dan layak untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya.

Penelitian Shonhadji & Irwandi (2023) pada *Banks and Bank Systems* mengonfirmasi bahwa strategi *anti-fraud* yang komprehensif, yaitu mencakup pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran secara terintegrasi mampu memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada perbankan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan dan deteksi *fraud* lebih optimal ketika mekanisme tata kelola diimplementasikan secara menyeluruh dan tidak parsial. Implikasi praktisnya, Bank Umum Syariah perlu memastikan bahwa ketiga mekanisme tersebut tidak hanya ada secara formal, tetapi berjalan secara sinergis sebagai satu kesatuan sistem pengawasan yang terintegrasi.